



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOPPENG T.A .2017**

**RENCANA KERJA
TAHUN 2018**

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

BAPPELITBANGDA

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra SKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Bappelitbangda Kabupaten Soppeng menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2018. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja Bappelitbangda yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Bappelitbangda demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga teknis di bidang perencanaan, Bappelitbangda Kabupaten Soppeng akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Soppeng.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Soppeng Tahun 2018 ini dapat memberi warna bagi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan renponsif menuju pembangunan Kabupaten Soppeng yang lebih baik.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPELITBANGDA TAHUN 2016 | 7 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun 2016 dan Capaian Renstra | 7 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda | 14 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda | 17 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 20 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 20 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | 30 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi | 30 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda | 31 |
| 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas Bappelitbangda | 31 |
| BAB IV PENUTUP | 41 |



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)**

Jl. Salotungo No. 01 Telp. (0484-23558) Watansoppeng

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 050 /027/ SK-BAPPELITBANGDA / VII /2017**

**TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

TAHUN 2018

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

- Mengingat :
- a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, perlu disusun dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018
 - b. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - d. bahwa rancangan akhir RENJA SKPD telah disahkan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 2017
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d diatas perlu ditetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018 dengan keputusan Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Menimbang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
 24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
 27. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018;
 28. Peraturan Bupati Soppeng tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor 33 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018**

Pasal 1.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2018.

Pasal 2.

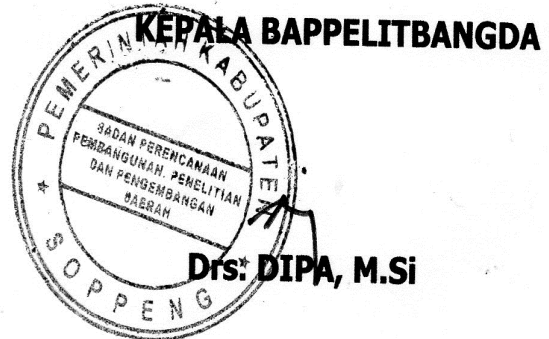
Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng

Pada tanggal : 17 Juli 2017



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

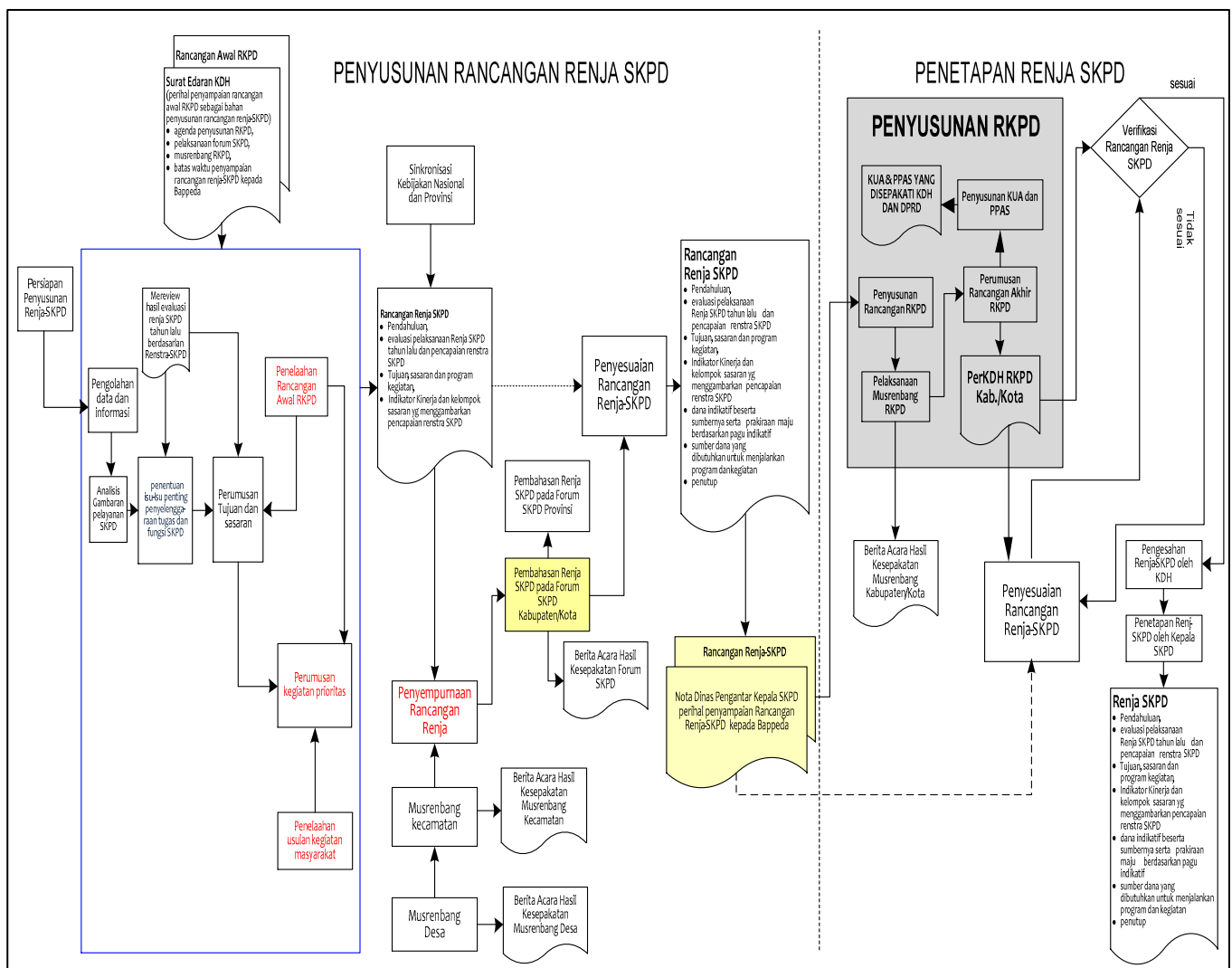
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Bappelitbangda mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2017 ini merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.



Penyusunan Renja Bappelitbangda Tahun 2017 telah melalui proses penyusunan dan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yaitu pembahasan internal Bappelitbangda khususnya tim penyusun Renja Bappelitbangda 2017, hal ini guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan pada tahun rencana 2017 melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Penyusunan Renja Bappelitbangda Tahun 2017 ini berpedoman kepada RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya selain urusan perencanaan pembangunan daerah terdapat pula urusan statistik yang menjadi tanggung jawab Bappelitbangda. Selanjutnya Renja Bappelitbangda Kabupaten Soppeng Tahun 2017 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappelitbangda Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Bappelitbangda Kab. Soppeng dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda yaitu meliputi (1) bidang perencanaan pembangunan, (2) bidang statistik untuk tahun rencana 2017

Tujuan dari penyusunan Renja ini adalah untuk :

- a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan hingga tahun 2014 dan proyeksi tahun 2015.
- b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Bappelitbangda.
- c. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Bappelitbangda Kabupaten Soppeng.
- d. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.
- e. Acuan dalam penyusunan RKA Bappelitbangda Tahun 2017

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka pokok bahasan serta susunan garis besar penulisan Renja ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Kinerja pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Bappeda 2016–2021

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi.

Secara keseluruhan pelaksanaan program/kegiatan Renja Bappelitbngda hingga tahun 2017 memenuhi kinerja. Lebih detail dapat diterangkan berdasarkan uraian sebagai berikut :

Perencanaan Pembangunan

Tugas terpenting yang dilakukan Bappelitbngda adalah tersusunnya 3 dokumen perencanaan daerah yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD. Hingga tahun 2016, setiap tahun. Bappeda telah melakukan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD, Selanjutnya dokumen perencanaan di tingkat SKPD juga perlu peningkatan kualitas dan penyusunannya belum melalui tata cara dan petahapan yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu dokumen perencanaan komplementer serta instrumen perencanaan lainnya yaitu penyusunan nilai tukar petani, rencana aksi peningkatan IPM, serta fungsi koordinasi lainnya yang telah terlaksana. Serta belum adanya kerangka yang jelas dalam pelaksanaan Standar pelayanan Minimum (SPM) di daerah sehingga

SPM belum dapat terlaksana dengan baik. Ke depannya perlu peningkatan fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, baik terhadap perencanaan tahunan, 5 tahunan dokumen jangka panjang serta penting tidaknya “mengadakan” dokumen komplementer yang penting atau tidak penting apakah dokumen tersebut mampu mendongkrak tujuan yang diinginkan serta juga perlunya pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen yang tercapai.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPDs/d Tahun 2017

SKPD : BAPPELITBANGDA

| Kode | Sasaran/urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target kinerja pencapaian program (renstra SKPD)(Akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun lalu | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 | | | Target Program /kegiatan Renja SKPD tahun 2017 | Perkiraan realisasi renstra SKPD tahun 2017 | | | | |
|------|---|---|--|---|--|---------------------------|-----------------------|--|---|---------------------------------------|----|----|---|
| | | | | | Target Renja SKPD 2016 | Realisasi Renja SKPD 2016 | Tingkat realisasi (%) | | Realisasi capaian s/d tahun 2017 | Tingkat capaian realisasi renstra (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | | | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 72 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 0 |
| 01 | 01 | 01 | 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional | 15 | 11 | 11 | 11 | 100 | 15 | 26 | 2 |
| 01 | 01 | 01 | 05 | Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan | 16 | 16 | 16 | 16 | 100 | 16 | 32 | 2 |
| 01 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | 75 | 13 | 13 | 13 | 100 | 10 | 23 | 0 |
| 01 | 01 | 01 | 08 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 10 | 6 | 6 | 6 | 100 | 10 | 16 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|------|--------|--------|--------|-----|------|-------|-----|
| 01 | 01 | 01 | 09 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah pengisian gas | 72 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 0 |
| 01 | 01 | 01 | 10 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 6730 | 620 | 620 | 620 | 100 | 1070 | 1,690 | 0 |
| 01 | 01 | 01 | 11 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 8 | 2 |
| 01 | 01 | 01 | 06 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan | Jumlah alat listrik/penerangan bangunan | 20 | | | | | 20 | 20 | 1 |
| | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | % pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | | | | | | | | |
| | | | | | -Komputer/pc | 18 | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | 5 | 0 |
| | | | | | -Note book | 25 | | | | | 2 | 2 | 0 |
| | | | | | -Printer | 24 | | | | | 2 | 2 | 0 |
| | | | | | - Hardisk | 6 | | | | | | | |
| 01 | 01 | 02 | 10 | Pengadaan Mebeleur | - Kusri Kerja | 40 | | | | | 24 | 24 | 1 |
| | | | | | - Meja Rapat | 13 | | | | | | | |
| | | | | | - Kursi Rapat | 8 | | | | | | | |
| | | | | | - Kursi Tamu | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 01 | 02 | 13 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor | 1 | 360.24 | 360.24 | 360.24 | 100 | 1 | 361 | 361 |
| 01 | 01 | 02 | 15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | | | | | | | | |
| | | | | | - Roda 2 | 19 | 10 | 10 | 10 | 100 | 11 | 21 | 1 |
| | | | | | -Roda 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|----|----|----|----|-----|----|----|---|
| 01 | 01 | 02 | 17 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | | | | | | | | |
| | | | | | -AC | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 40 | 2 |
| | | | | | - Mebeleur | 4 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 1 |
| | | | | | -LCD | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 2 |
| 01 | 01 | 02 | 19 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | | | 29 | 29 | | | 29 | |
| | | | | | - komputer | 18 | | | | | 12 | 12 | 1 |
| | | | | | -Notebook | 25 | | | | | 15 | 15 | 1 |
| | | | | | - Printer | 24 | | | | | 14 | 14 | 1 |
| | | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | % Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 04 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan dan dokumen perencanaan SKPD | 45 | 8 | 8 | 8 | 100 | 7 | 15 | 0 |
| 01 | 01 | 04 | 04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Laporan keuangan semesteran/akhir tahun | 12 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 0 |
| | | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | % Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPd yang sesuai dengan regulasi | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | 16 | Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa | Jumlah dokumen RPJMD dan naskah akademik | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | | 1 | 0 |
| 01 | 01 | 01 | 02 | Penyusunan Rancangan RKPd | Jumlah dokumen RKPd dan RKPd Perubahan | 12 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|---|------|----|----|----|---|-----|-----|---|
| 01 | 01 | 01 | 03 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Jumlah dokumen musrenbang | 30 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 0 |
| 01 | 01 | 01 | 10 | Koordinasi Pelaksanaan Program WISMP | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi | 7 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
| 01 | 01 | 01 | 11 | Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 01 | 01 | 01 | 04 | Penyusunan KUA-PPAS | Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok dan Perubahan | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 01 | 01 | 01 | 14 | Koordinasi Perencanaan Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan (PPSP) | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 01 | 01 | 01 | 12 | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 01 | 01 | 01 | 15 | Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi | 2400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | 401 | 0 |
| 01 | 01 | 01 | 18 | Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/kota layak anak | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi | 6 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0 |
| 01 | 01 | 01 | 05 | Asistensi Penyusunan RAPBD | Jumlah SKPD yang diasistensi | 38 | 37 | 37 | 37 | 1 | 38 | 75 | 2 |
| 01 | 01 | 01 | 09 | Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif | Jumlah peserta sosialisasi | 480 | 80 | 80 | 80 | 1 | 80 | 160 | 0 |
| 01 | 01 | 01 | 20 | Penyusunan, Pengumpulan dan analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Ekonomi | Jumlah dokumen | 6 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
| 01 | 01 | 01 | 21 | Penyusunan, Pengumpulan dan analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosbud. | Jumlah dokumen | 6 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
| 01 | 01 | 01 | 22 | Penyusunan, Pengumpulan dan analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang . Fisik dan Prasarana | Jumlah dokumen | 6 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|----|---|---|---|---|----|----|---|
| 01 | 01 | 01 | 23 | Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/ Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan | Jumlah dokumen perjanjian kinerja | 6 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
| 01 | 01 | 01 | 25 | Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) | Jumlah dokumen SIPD | 6 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
| 01 | 01 | 01 | 26 | Penyusunan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah | Jumlah dokumen penelitian & pengembangan | 25 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
| | | | | Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pmbangunan | % program RPJMD yang dijabarkan kedalam RKPD | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 02 | 01 | Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen hasil monev pelaksanaan APBD dan APBN rencana pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Soppeng | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 01 | 01 | 02 | 03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen LKJIP Kabupaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 01 | 01 | 02 | 05 | Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) | Jumlah dokumen revisi | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 02 | 06 | Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) | Jumlah dokumen hasil evaluasi | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 01 | 01 | 02 | 07 | Evaluasi Mandiri Kepala Daerah Berbasis Key Performance Indikator (KPI) | Jumlah dokumen evaluasi | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| | | | | Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase ASN yang meningkat kompetensinya dalam hal perencanaan. | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 03 | 01 | Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana | Jumlah tenaga perencana yang lulus bersertifikat dan yang mengikuti diklat/bimtek | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda

Indikator kinerja diukur berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pada lampiran I, Bappelitbangda pada hal ini memiliki 3 Bidang yaitu : Bidang Ekonomi, Bidang Sosial budaya, Bidang Fisik dan Prasarana

Tabel 2.2
Review Pencapaian Kinerja
PelayananSKPD

| No. | Indikator | Target SPM/IKK/standar nasional/internasional | Target Renstra SKPD | | | | Realisasi Capain | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|---|---------------------|-------|-------|--------|------------------|------|----------|--------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Persentase penjabaran program pembangunan daerah kedalam RKPD | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | |
| 2 | Jumlah aparatur Bappelitbangda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, substantive dan teknis | | 4 Org | 6 Org | 8 Org | 11 Org | 4 | | 8 Org | 11 Org | |
| 3 | Persentase target kinerja sasaran RPJMD yang tercapai | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | |
| 4 | Ketersediaan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | Ada | Ada | |
| 5 | Persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD | | 100% | 100% | 100% | 100% | 53,69 | | 100% | 100% | |
| 6 | Persentase penjabaran Kegiatan RKPD kedalam APBD | | 100% | 100% | 100% | 100% | 98,71 | | 100% | 100% | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------|-------|-------|--------|-------|--|-------|--------|--|
| 7 | Jumlah aparatur yang mendapatkan sertifikat perencana | | 4 Org | 6 Org | 8 Org | 11 Org | 2 | | 8 Org | 11 Org | |
| 8 | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindak lanjuti | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | | 100% | 100% | |
| 9 | Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | | 100% | 100% | |
| 10 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | | 100% | 100% | |
| 11 | Buku Kabupaten dalam angka | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | Ada | Ada | |
| 12 | Buku PDRB Kabupaten | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | Ada | Ada | |
| 13 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | Ada | Ada | |
| 14 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | Ada | Ada | |
| 15 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | Ada | Ada | |
| 16 | Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD | | 100% | 100% | 100% | 100% | 53,69 | | 100% | 100% | |

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan koordinasi melalui musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang pelaksanaannya dimulai dari tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten. Musrenbang RKPD Provinsi /Kabupaten/Kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi/kabupaten /Kota sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.

Musrenbang Kabupaten/Kota adalah merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten dan Kota yang melibatkan para pelaku pembangunan Kabupaten dan Kota sebagai bahan masukan dokumen prioritas program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari kecamatan, evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun sebelumnya, rancangan RKPD Kabupaten/Kota dan Renja SKPD. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya serta berita acara Musrenbang Kabupaten/Kota dengan tujuan :

1. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah desa/kel dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah kab/kota;
2. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kab/kota pada musrenbang RKPD kab/kota di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kab/kota dilaksanakan;
3. Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kab/kota; dan
4. menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah.

Struktur organisasi Bappelitbangda saat ini telah berubah dengan adanya kelembagaan baru Keberadaan sekretariat dan tiga bidang (Bidang Fisik & Prasarana, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya.). Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kedepan, pengembangan kelembagaan Bappelitbangda ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga. Dalam kaitan ini, Bappelitbangda perlu menyiapkan rencana induk pengembangan sarana dan

prasarana sebagai pedoman pengembangan sarana dan prasarana dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi lembaga.

1. **Peningkatan Kualitas dan Peran Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan upaya menerapkan prinsip good governance beberapa hal harus diperhatikan, antara lain:
 - a. Kualitas (*quality*) dan kuantitas pegawai Bappelitbangda yang memadai.
 - b. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia Bappelitbangda seyogyanya terarah dengan baik yang ditunjukkan dengan jelasnya strategi pengembangan dan pelatihan (*training & development*), jenjang karir (*career path*), penilaian kinerja (*performance management*), serta sistem remunerasi dan kompensasi pegawai (*compesation & benefit*). Integrasi aspek-aspek tersebut merupakan kunci keberhasilan terciptanya sumber daya aparatur Bappelitbangda yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan pembangunan dan dinamika perubahan yang terjadi dalam lima tahun ke depan.
2. **Peningkatan dan penguatan kinerja organisasi** mutlak dilakukan secara sistematis dan terukur, sebagai berikut :
 - a. **Selaku Pengambilan Keputusan** terkait dengan alokasi sumberdaya pembangunan, Bappelitbangda diharapkan dapat berperan penuh dalam menyusun rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan rencana kerja tahunan, serta menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya. Selain itu, Bappelitbangda diharap secara aktif melakukan pengkajian kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan secara keseluruhan sebagai masukan baik kepada seluruh bidang lingkup Bappelitbangda maupun lembaga/institusi lingkup pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
 - b. **Selaku Koordinator** perlu dipertegas dan diberdayakan tidak saja dalam mengkoordinasikan perencanaan antar SKPD di tingkat kabupaten/kota tetapi juga penganggaran dan pelaksanaannya.
 - c. **Selaku Fasilitator**, Bappelitbangda diharapkan menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholders baik di tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten/kota termasuk pihak swasta.
 - d. **Selaku Komunikator**, Bappelitbangda diharapkan secara aktif melakukan sosialisasi tentang produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian strategik melalui berbagai media diseminasi.
 - e. **Sebagai Administrator**, Bappelitbangda diharapkan; (1) terus meningkatkan kualitas pengelolaan tahapan/proses perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan; (2) secara aktif menyusun dan menyebarluaskan sistem prosedur pelaksanaan; (3) peran aktif sebagai penyusun kebijakan dan pemantau pelaksanaan pembangunan; dan (4) peran aktif sebagai penyusun kebijakan pelaksanaan good governance dalam pelaksanaan APBD dan APBN.

Dalam upaya Mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappelitbangda Kabupaten Soppeng menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Sedangkan kerangka pikir penyusunan strategi tersebut mempertimbangkan sinergisme antara tiga faktor utama pembangunan, yaitu: (1) Sektor unggulan (prioritas pembangunan); (2) Kondisi eksisting masing-masing wilayah pembangunan; dan (3) Bidang masalah yang akan ditangani.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain: cakupan wilayah dari tingkat kabupaten ke tingkat desa/kel; fasilitas yang dimiliki; anggaran yang dikelola; hasil perencanaan dan kajian strategik pembangunan yang telah dihasilkan dan dimanfaatkan; serta keterpaduan/interaksi dengan *stakeholders* yang sudah semakin meningkat. Disamping kekuatan tersebut, ternyata hingga saat ini masih dijumpai berbagai kelemahan internal Bappelitbangda Kabupaten Soppeng yang harus ditekan serendah mungkin, antara lain: belum terpenuhinya *critical mass* kompetensi SDM di masing-masing Bidang; belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil kajian strategis pembangunan dalam perencanaan pembangunan; rendahnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini; serta belum primanya pelayanan Bappeda kepada *stakeholders* dan masyarakat.

Di sisi lain, hasil analisis terhadap faktor eksternal menemukan berbagai peluang yang perlu dimanfaatkan dalam strategi dan kebijakan Bappelitbangda, antara lain: tingginya kepercayaan pimpinan terhadap keberadaan Bappelitbangda tidak saja dalam merencanakan tetapi juga mengkoordinasikan pembangunan; pesatnya perkembangan teknologi informasi; tersedianya inovasi teknologi yang memadai; globalisasi yang akan membuka peluang meningkatkan peluang kerjasama perdagangan; dan terbukanya peluang kerjasama dalam pembangunan Kabupaten Soppeng secara keseluruhan. Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman tersebut, antara lain ego SKPD yang menyebabkan rendahnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2018

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil analisis kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|--------------|---|----------------|-------------------------|---|--------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Prog/Keg. | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Prog/Keg. | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Watansoppeng | % Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD yang sesuai dengan regulasi | 100% | 1,263,700,000 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Watansoppeng | % Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD yang sesuai dengan regulasi | 100% | 1,263,700,000 | |
| 1 | Penyusunan RPJMD | | Jumlah dokumen RPJMD dan naskah akademik | | | Penyusunan RPJMD | | Jumlah dokumen RPJMD dan naskah akademik | | | |
| 2 | Penyusunan RKPD | Watansoppeng | Jumlah dokumen RKPD dan RKPD Perubahan | 2 dok | 41,700,000 | Penyusunan RKPD | Watansoppeng | Jumlah dokumen RKPD dan RKPD Perubahan | 2 dok | 41,700,000 | |
| 3 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Watansoppeng | Jumlah dokumen musrenbang | | | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Watansoppeng | Jumlah dokumen musrenbang | | | |
| 4 | Penyusunan KUA-PPAS | Watansoppeng | Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok dan Perubahan | 2 dok | 46,500,000 | Penyusunan KUA-PPAS | Watansoppeng | Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok dan Perubahan | 2 dok | 46,500,000 | |
| 5 | Asistensi Penyusunan RAPBD | Watansoppeng | Jumlah SKPD yang diasistensi | 38 SKPD | 100,000,000 | Asistensi Penyusunan RAPBD | Watansoppeng | Jumlah SKPD yang diasistensi | 38 SKPD | 100,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|---|------------|-------------|--|--------------|---|------------|-------------|
| 6 | Penyusunan Naskah Akademik Rancangan RPJMD | Watansoppeng | Jumlah dokumen | | | Penyusunan Naskah Akademik Rancangan RPJMD | Watansoppeng | Jumlah dokumen | | |
| 7 | Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD | Watansoppeng | Jumlah SKPD | | | Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD | Watansoppeng | Jumlah SKPD | | |
| 8 | Penyusunan Indikator Kinerja Utama | Watansoppeng | Jumlah dokumen RAD | | | Penyusunan Indikator Kinerja Utama | Watansoppeng | Jumlah dokumen RAD | | |
| 9 | Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan irigasi Partisipatif | Watansoppeng | Jumlah Peserta Sosialisasi | 80 org | 100,000,000 | Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan irigasi Partisipatif | Watansoppeng | Jumlah Peserta Sosialisasi | 80 org | 100,000,000 |
| 10 | Koordinasi Pelaksanaan Program WISMP | Watansoppeng | Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan koordinasi | 1 dok | 40,000,000 | Koordinasi Pelaksanaan Program WISMP | Watansoppeng | Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan koordinasi | 1 dok | 40,000,000 |
| 11 | Koordinasi Pembinaan Kabupaten sehat | Watansoppeng | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi | 1 dok | 55,000,000 | Koordinasi Pembinaan Kabupaten sehat | Watansoppeng | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi | 1 dok | 55,000,000 |
| 12 | Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah | Watansoppeng | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi | 2 dok | 28,000,000 | Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah | Watansoppeng | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi | 2 dok | 28,000,000 |
| 13 | Koordinasi Perencanaan Responsif Gender | Watansoppeng | Jumlah SKPD yang menerapkan PPRG | 37 SKPD | 45,000,000 | Koordinasi Perencanaan Responsif Gender | Watansoppeng | Jumlah SKPD yang menerapkan PPRG | 37 SKPD | 45,000,000 |
| 14 | Koordinasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota layak Anak | Watansoppeng | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi | 1 dok | 38,500,000 | Koordinasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota layak Anak | Watansoppeng | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi | 1 dok | 38,500,000 |
| 15 | Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan Saniatsi Perkotaan (PPSP) | Watansoppeng | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi | 1 dok | 19,500,000 | Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan Saniatsi Perkotaan (PPSP) | Watansoppeng | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi | 1 dok | 19,500,000 |
| 16 | Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah | Watansoppeng | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi | 400 org | 120,000,000 | Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah | Watansoppeng | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi | 400 org | 120,000,000 |
| 17 | Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa | Watansoppeng | Jumlah Desa yang didampingi | 29 desa | 70,000,000 | Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa | Watansoppeng | Jumlah Desa yang didampingi | 29 desa | 70,000,000 |
| 18 | Pembangunan sistem Informasi Perencanaan Pembangunan | Watansoppeng | Jumlah aplikasi/software | 1 software | 90,000,000 | Pembangunan sistem Informasi Perencanaan Pembangunan | Watansoppeng | Jumlah aplikasi/software | 1 software | 90,000,000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|--|-------|-------------|--|--------------|--|-------|-------------|
| 19 | Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan | Watansoppeng | jumlah dokumen perjanjian kinerja | 1 dok | 19,500,000 | Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan | Watansoppeng | jumlah dokumen perjanjian kinerja | 1 dok | 19,500,000 |
| 20 | penyusunan Penelitian dan Pembenganan Pembangunan Daerah | Watansoppeng | Jumlah dokumen penelitian & pengembangan | 4 dok | 130,000,000 | penyusunan Penelitian dan Pembenganan Pembangunan Daerah | Watansoppeng | Jumlah dokumen penelitian & pengembangan | 4 dok | 130,000,000 |
| 21 | Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah(SIPD) | Watansoppeng | Jumlah dokumen SIPD | 1 dok | 25,000,000 | Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah(SIPD) | Watansoppeng | Jumlah dokumen SIPD | 1 dok | 25,000,000 |
| 22 | Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang ekonomi | Watansoppeng | Jumlah dokumen | 1 dok | 15,000,000 | Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang ekonomi | Watansoppeng | Jumlah dokumen | 1 dok | 15,000,000 |
| 23 | Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya | Watansoppeng | Jumlah dokumen | 1 dok | 15,000,000 | Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya | Watansoppeng | Jumlah dokumen | 1 dok | 15,000,000 |
| 24 | Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana | Watansoppeng | Jumlah dokumen | 1 dok | 15,000,000 | Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana | Watansoppeng | Jumlah dokumen | 1 dok | 15,000,000 |
| 25 | Penyusunan Indikator Ekonomi | Watansoppeng | Jumlah dokumen Indikator Ekonomi | | | Penyusunan Indikator Ekonomi | Watansoppeng | Jumlah dokumen Indikator Ekonomi | | |
| 26 | Analisis Sektor unggulan terhadap Pengembangan Investasi Daerah | Watansoppeng | Jumlah dokumen analisis sektor unggulan terhadap pengembangan investasi daerah | | | Analisis Sektor unggulan terhadap Pengembangan Investasi Daerah | Watansoppeng | Jumlah dokumen analisis sektor unggulan terhadap pengembangan investasi daerah | | |
| II | Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah | Watansoppeng | Persentase ASN yang meningkat kompetensinya dalam hal perencanaan | 43.90 | 203,000,000 | Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah | Watansoppeng | Persentase ASN yang meningkat kompetensinya dalam hal perencanaan | 43.90 | 203,000,000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--|---------|-------------|--|--------------|--|---------|-------------|
| 1 | Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana | Watansoppeng | Jumlah tenaga perencanaan yang lulus bersertifikat | 18 org | 83,000,000 | Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana | Watansoppeng | Jumlah tenaga perencanaan yang lulus bersertifikat | 18 org | 83,000,000 |
| 2 | Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah | Watansoppeng | Jumlah Peserta Workshop | 100 org | 120,000,000 | Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah | Watansoppeng | Jumlah Peserta Workshop | 100 org | 120,000,000 |
| III | Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan pembangunan Daerah | Watansoppeng | % program RPJMD yang dijabarkan kedalam RKPd | 100% | 563,000,000 | Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan pembangunan Daerah | Watansoppeng | % program RPJMD yang dijabarkan kedalam RKPd | 100% | 563,000,000 |
| 1 | Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) | Watansoppeng | Jumlah dokumen revisi | | | Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) | Watansoppeng | Jumlah dokumen revisi | | |
| 2 | Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) | Watansoppeng | Jumlah dokumen hasil evaluasi | 1 dok | 33,000,000 | Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) | Watansoppeng | Jumlah dokumen hasil evaluasi | 1 dok | 33,000,000 |
| 3 | Revisi RPJMD | Watansoppeng | Jumlah dokumen hasil revisi | 1 dok | 200,000,000 | Revisi RPJMD | Watansoppeng | Jumlah dokumen hasil revisi | 1 dok | 200,000,000 |
| 4 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah | Watansoppeng | Jumlah dokumen hasil monev pelaksanaan APBD dan APBN rencana pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Soppeng | 2 dok | 75,000,000 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah | Watansoppeng | Jumlah dokumen hasil monev pelaksanaan APBD dan APBN rencana pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Soppeng | 2 dok | 75,000,000 |
| 5 | Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Watansoppeng | Jumlah Dokumen LKJIP Kabupaten | 1 dok | 50,000,000 | Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Watansoppeng | Jumlah Dokumen LKJIP Kabupaten | 1 dok | 50,000,000 |
| 6 | Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPPJ) | Watansoppeng | Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ serta ILPPD | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPPJ) | Watansoppeng | Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ serta ILPPD | | |
| 7 | Evaluasi Mandiri Kepala Daerah Barbasis Key Performance Indicator (KPI) | Watansoppeng | Jumlah dokumen evaluasi | 2 dok | 155,000,000 | Evaluasi Mandiri Kepala Daerah Barbasis Key Performance Indicator (KPI) | Watansoppeng | Jumlah dokumen evaluasi | 2 dok | 155,000,000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|--|----------------------|---------------|--|----------------|--|----------------------|---------------|
| 8 | Pembangunan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi | Watansoppeng | Jumlah aplikasi/software | 1 paket pemeliharaan | 50,000,000 | Pembangunan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi | Watansoppeng | Jumlah aplikasi/software | 1 paket pemeliharaan | 50,000,000 |
| IV | Program Pelayanan Perkantoran | Bappelitbangda | % Penyelesaian kegiatan tepat waktu | 100% | 1,399,450,000 | Program Pelayanan Perkantoran | Bappelitbangda | % Penyelesaian kegiatan tepat waktu | 100% | 1,399,450,000 |
| 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Bappelitbangda | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 kali | 120,000,000 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Bappelitbangda | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 kali | 120,000,000 |
| 2 | Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Bappelitbangda | Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional | 15 unit | 4,050,000 | Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Bappelitbangda | Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional | 15 unit | 4,050,000 |
| 3 | Penyediaan layanan kebersihan kantor | Bappelitbangda | Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan | 16 orang 20 jenis | 110,000,000 | Penyediaan layanan kebersihan kantor | Bappelitbangda | Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan | 16 orang 20 jenis | 110,000,000 |
| 4 | Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor | Bappelitbangda | Jumlah alat listrik/penerangan bangunan | 20 buah | 10,000,000 | Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor | Bappelitbangda | Jumlah alat listrik/penerangan bangunan | 20 buah | 10,000,000 |
| 5 | Penyediaan Peralatan Rumah tangga | Bappelitbangda | Jumlah Peralatan Rumah tangga | 10 jenis | 8,000,000 | Penyediaan Peralatan Rumah tangga | Bappelitbangda | Jumlah Peralatan Rumah tangga | 10 jenis | 8,000,000 |
| 6 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Bappelitbangda | Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 10 terbitan | 11,000,000 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Bappelitbangda | Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 10 terbitan | 11,000,000 |
| 7 | Penyediaan bahan logistik kantor | Bappelitbangda | Jumlah pengisian gas | 12 kali | 1,400,000 | Penyediaan bahan logistik kantor | Bappelitbangda | Jumlah pengisian gas | 12 kali | 1,400,000 |
| 8 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah | Bappelitbangda | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 1070 kali | 750,000,000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah | Bappelitbangda | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 1070 kali | 750,000,000 |
| 9 | Peningkatan pelayanan pekantoran | Bappelitbangda | Jumlah Paket pelayanan Perkantoran | 4 paket | 330,000,000 | Peningkatan pelayanan pekantoran | Bappelitbangda | Jumlah Paket pelayanan Perkantoran | 4 paket | 330,000,000 |
| 10 | Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor | Bappelitbangda | Jumlah Informasi yang terupdate dalam setahun | 48 berita | 55,000,000 | Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor | Bappelitbangda | Jumlah Informasi yang terupdate dalam setahun | 48 berita | 55,000,000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|---------|-------------|---|----------------|--|---------|-------------|
| 11 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Bappelitbangda | % pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran | 90 % | 365,250,000 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Bappelitbangda | % pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran | 90 % | 365,250,000 |
| 12 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Bappelitbangda | Jumlah Kendaraan dinas | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Bappelitbangda | Jumlah Kendaraan dinas | | |
| | | Bappelitbangda | Roda 2 | 2 unit | 40,000,000 | | Bappelitbangda | Roda 2 | 2 unit | 40,000,000 |
| | | Bappelitbangda | Roda 4 | | | | Bappelitbangda | Roda 4 | | |
| 13 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Bappelitbangda | Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang diadakan | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Bappelitbangda | Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang diadakan | | |
| | | Bappelitbangda | Lemari | | | | Bappelitbangda | Lemari | | |
| | | Bappelitbangda | AC | 2 unit | 18,000,000 | | Bappelitbangda | AC | 2 unit | 18,000,000 |
| | | | Gorden | | | | | Gorden | | |
| | | | White Board | | | | | White Board | | |
| 14 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | Jumlah peralatan gedung kantot yang diadakan | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | Jumlah peralatan gedung kantot yang diadakan | | |
| | | Bappelitbangda | komputer | 1 unit | 10,000,000 | | Bappelitbangda | Komputer | 1 unit | 10,000,000 |
| | | Bappelitbangda | - Notebook | 2 unit | 30,000,000 | | Bappelitbangda | - Notebook | 2 unit | 30,000,000 |
| | | Bappelitbangda | - Printer | 2 unit | 7,000,000 | | Bappelitbangda | - Printer | 2 unit | 7,000,000 |
| | | Bappelitbangda | - Hardisk | | | | Bappelitbangda | - Hardisk | | |
| 15 | Pengdaan Mebeuler | Bappelitbangda | - Kursi Kerja | 11 buah | 19,250,000 | Pengdaan Mebeuler | Bappelitbangda | - Kursi Kerja | 11 buah | 19,250,000 |
| | | Bappelitbangda | - Meja Rapat | 4 buah | 15,000,000 | | Bappelitbangda | - Meja Rapat | 4 buah | 15,000,000 |
| | | | - Kursi Rapat | | | | | - Kursi Rapat | | |
| | | | - kursi Tamu | | | | | - kursi Tamu | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|--|---------|------------|---|------------------------|--|---------|------------|
| 16 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Gabungan Dinas | Jumlah Gedung kantor | 1 unit | 80,000,000 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Gabungan Dinas | Jumlah Gedung kantor | 1 unit | 80,000,000 |
| 17 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | | |
| | | Bappelitbangda | Roda 2 | 13 unit | 40,000,000 | | Bappelitbangda | Roda 2 | 13 unit | 40,000,000 |
| | | Bappelitbangda | Roda 4 | 1 unit | 60,000,000 | | Bappelitbangda | Roda 4 | 1 unit | 60,000,000 |
| 18 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | | |
| | | Bappelitbangda | - AC | 20 unit | 25,000,000 | | Bappelitbangda | - AC | 20 unit | 25,000,000 |
| | | Bappelitbangda | - Mebeleur | 2 paket | | | Bappelitbangda | - Mebeleur | 2 paket | |
| | | Bappelitbangda | - LCD | 2 unit | | | Bappelitbangda | - LCD | 2 unit | |
| 19 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Kantor Gabuungan Dinas | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Kantor Gabuungan Dinas | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | | |
| | | | - Kmputer/PC | 13 unit | 21,000,000 | | | - Kmputer/PC | 13 unit | 21,000,000 |
| | | | - Notebook | 18 unit | | | | - Notebook | 18 unit | |
| | | | - Printer | 17 unit | | | | - Printer | 17 unit | |
| V | Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur | | % ASN Berkinerja Baik (SKP) | 100% | | Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur | | % ASN Berkinerja Baik (SKP) | 100% | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu | | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu | | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | | |
| VI | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Watansoppeng | % Penyusunan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu | 100% | 54,000,000 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Watansoppeng | % Penyusunan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu | 100% | 54,000,000 |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Watansoppeng | Jumlah laporan dan dokumen perencanaan SKPD | 7 dok | 35,000,000 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Watansoppeng | Jumlah laporan dan dokumen perencanaan SKPD | 7 dok | 35,000,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--|-------|------------|---|---------------|--|-------|------------|--|
| | | Lalabatarilau | Laporan Kinerja Bappelitbangda | 1 dok | | | Lalabatarilau | Laporan Kinerja Bappelitbangda | 1 dok | | |
| | | Lalabatarilau | LPPD dan LKPJ Bappelitbangda | 2 dok | | | Lalabatarilau | LPPD dan LKPJ Bappelitbangda | 2 dok | | |
| | | Lalabatarilau | RKA Pokok & Perubahan | 2 dok | | | Lalabatarilau | RKA Pokok & Perubahan | 2 dok | | |
| | | Lalabatarilau | Renja Pokok & Perubahan | 2 dok | | | Lalabatarilau | Renja Pokok & Perubahan | 2 dok | | |
| | | Lalabatarilau | Renstra Bappelitbangda & Renstra perubahan | 1 dok | | | Lalabatarilau | Renstra Bappelitbangda & Renstra perubahan | 1 dok | | |
| 1 | Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun | Lalabatarilau | Jumlah Laporan Keuangan Semesteran/akhir tahun | 2 dok | 19,000,000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun | Lalabatarilau | Jumlah Laporan Keuangan Semesteran/akhir tahun | 2 dok | 19,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | |

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Tahun 2018 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016–2021. Dimana pada Perda tersebut dijelaskan bahwa prediksi kondisi umum daerah dan arah kebijakan untuk RPJMD ke -3 dengan menekankan percepatan pembangunan dan roda perekonomian daerah dipicu melalui penerapan sistem agribisnis dan agroindustri berlandaskan sumberdaya lokal.

RKPD tahun 2018, menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang merupakan tahun pertama dari RPJMD 2016–2021 yang memuat Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu **“Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik”** dengan 9 tekad yaitu **7 Tekad Pemerintahan yang Melayani** yakni Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani, Mewujudkan pendidikan unggul (lebih baik) dan murah serta berkeadilan bagi semua warga, Menjadikan Kab. Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik, Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang baik dan nyaman, Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi, Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul (lebih baik) dan murah serta Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan. Selanjutnya, **2 Tekad Menjadikan Soppeng Lebih Baik** yakni Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan dan Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi.

2.5. Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya Renja Bappelitbangda Kab Soppeng mengacu pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2016–2021 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas dalam dokumen Rancangan RKPD Kab. Soppeng Tahun 2018. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Bappelitbangda Kab. Soppeng juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen–dokumen perencanaan yang ada, Renja Bappelitbangda Kab. Soppeng juga disusun berdasarkan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 dilaksanakan secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN, yaitu: RPJMN pertama tahun 2004–2009, RPJMN kedua tahun 2010–2014, RPJMN ketiga tahun 2015–2019, dan RPJMN keempat tahun 2020–2024.

Berdasarkan tema pembangunan nasional RKP tahun 2017 adalah *“Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kemampuan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”* dan tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan ada RKP Tahun 2017 adalah *“Peningkatan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Melalui Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”* maka tema pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah *“Percepatan Pembangunan Berlandaskan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal”*.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun mengikuti arah dan kebijakan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng (RPJMD) 2016–2021 dengan visi **“PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK”** serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2013–2018 dengan visi **“SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN PADA TAHUN 2018”** serta memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Nasional dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015–2019 **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda

Bappelitbangda Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan telah menetapkan beberapa tujuan. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam

setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappelitbangda Kabupaten Soppeng.

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016–2021, Bappelitbangda Kabupaten Soppeng sebagai institusi perencana berkewajiban meningkatkan penerapan kaidah pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang indikator keberhasilannya ditandai dengan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terhadap sasaran RPJMD, Bappelitbangda bertanggung jawab langsung terhadap Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban kinerja dimana indikatornya adalah penjabaran program RPJMD kedalam RKPD yang mutlak 100% setiap tahunnya, sehingga untuk mencapai beberapa target kinerja tadi maka tujuan dan sasaran Bappelitbangda adalah sebagai berikut:

➤ **Tujuan**

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah.

➤ **Sasaran**

1. Tercapainya konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, RKPD ke dalam APBD.
2. Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
3. Meningkatnya jumlah perencana yang memiliki kompetensi dasar perencanaan dan kapasitasnya sesuai dengan tugas fungsional
4. Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
5. Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan tupoksi Bappelitbangda pada urusan Statistik dan Perencanaan Pembangunan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program prioritas Bappelitbangda dalam rangka pencapaian sasaran strategis masuk ke dalam prioritas kebijakan daerah yang berkaitan dengan Bidang perencanaan pembangunan adalah *Program Perencanaan Pembangunan Daerah* Disamping program prioritas tersebut diatas diperlukan program-

program penunjang yang merupakan dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pemenuhan belanja tetap dan mengikat SKPD serta kegiatan yang bersifat sektoral. Adapun Program-program penunjang Bappelitbangda Tahun 2018 yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah
3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Pelayanan Perkantoran
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Secara umum program dan kegiatan Bappelitbangda kabupaten Soppeng pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Penyusunan RKPD
- b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- c. Penyusunan KUA-PPAS
- d. Asistensi Penyusunan RAPBD
- e. Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PPSP)
- f. Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat
- g. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- h. Koordinasi Perencanaan Rensponsif Gender
- i. Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)
- j. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
- k. Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa
- l. Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
- m. Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
- n. Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Ekonomi.
- o. Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya

- p. Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Fisik & Prasarana
 - q. Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
 - r. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
 - s. Penyusunan Penelitian dan Pengembangan pembangunan Daerah
 - t. Inovasi Pelayanan Publik.
- 2. Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah**
 - a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - b. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
 - c. Pengendalian dan Evaluasi RPJMD
 - d. Evaluasi Mandiri Kepala Daerah Berbasis KPI (Key Performance Indicator)
 - 3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - a. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
 - b. Workshop Perencanaan Pembangunan daerah
 - 4. Program Pelayanan Perkantoran**
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - c. Penyediaan layanan kebersihan kantor
 - d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g. Penyediaan bahan logistik kantor
 - h. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah
 - i. Peningkatan pelayanan perkantoran
 - 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - e. Rehabilitas sedang/berat gedung kantor
 - 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tabel

3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

| Kode | | | | Urusan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2018 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 | |
|------|----|----|----|--|---|--------------------|---------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target | Pagu indikatif (Rp) | Sumber dana | | Target | kebutuhan dan pagu indikatif (Rp) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 01 | 01 | 01 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | % Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD yang sesuai dengan regulasi | Watansoppeng | 100% | 1,842.122.250 | APBD | | 100% | 1,306,850,000 |
| 01 | 1 | 01 | 16 | Penyusunan RKPD | Jumlah dokumen RKPD dan RKPD Perubahan | Watansoppeng | 2 dok | 57.100.000 | APBD | | 2 dok | 42,000,000 |
| 01 | 1 | 01 | 03 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Jumlah dokumen musrenbang | Watansoppeng | 5 dok | 286.190.000 | APBD | | 5 dok | 250.000.000 |
| 01 | 1 | 01 | 04 | Penyusunan KUA- PPAS | Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok dan Perubahan | Watansoppeng | 2 dok | 44.500.000 | APBD | | 2 dok | 48,500,000 |
| 01 | 1 | 01 | 05 | Asistensi Penyusunan RAPBD | Jumlah SKPD yang diasistensi | 38 SKPD | 38 SKPD | 157.650.000 | APBD | | 38 SKPD | 110,000,000 |
| 01 | 1 | 01 | 09 | Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan irigasi Partisipatif | Jumlah Peserta Sosialisasi | Watansoppeng | 80 org | 229.371.000 | APBD | | 80 org | 100,000,000 |
| 01 | 1 | 01 | 11 | Koordinasi Pembinaan Kabupaten sehat | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi | Watansoppeng | 1 dok | 146.200.000 | APBD | | 1 dok | 55,700,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|----|--|---|--------------|------------|-------------|------|--|----------------------|-------------|
| 01 | 1 | 01 | 12 | Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi | Watansoppeng | 2 dok | 42.000.000 | APBD | | 2 dok | 30,000,000 |
| | | | | Koordinasi Perencanaan Responsif Gender | Jumlah SKPD yang menerapkan PPRG | Watansoppeng | 37 SKPD | 40.800.0000 | APBD | | 37 SKPD | 50,000,000 |
| 01 | 1 | 01 | 18 | Koordinasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota layak Anak | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi | Watansoppeng | 1 dok | 30.000.000 | APBD | | 1 dok | 40,000,000 |
| 01 | 1 | 01 | 14 | Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan Saniatsi Perkotaan (PPSP) | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi | Watansoppeng | 1 dok | 114.160.000 | APBD | | 1 dok | 21,000,000 |
| 01 | 1 | 01 | 15 | Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi | Watansoppeng | 400 org | 100.900.000 | APBD | | 400 Org | 130,000,000 |
| | | | | Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa | Jumlah Desa yang didampingi | Watansoppeng | 29 desa | 28.750.000 | APBD | | | |
| | | | | Pembangunan sistem Informasi Perencanaan Pembangunan | Jumlah aplikasi/software | Watansoppeng | 1 software | 57.900.000 | APBD | | 1 paket pemeliharaan | 50,000,000 |
| | | | | Pengumpulan,updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan | jumlah dokumen perjanjian kinerja | Watansoppeng | 1 dok | 26.535.000 | APBD | | 1 dok | 22,000,000 |
| | | | | penyusunan Penelitian dan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen penelitian & pengembangan | Watansoppeng | 4 dok | 361.250.000 | APBD | | 4 dok | 140,000,000 |
| 01 | 1 | 01 | 25 | Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah(SIPD) | Jumlah dokumen SIPD | Watansoppeng | 1 dok | 18.500.000 | APBD | | 1 dok | 27,500,000 |
| 01 | 1 | 01 | 20 | Penyusunan,Pengumpulan & Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang ekonomi | Jumlah dokumen | Watansoppeng | 1 dok | 15,500,000 | APBD | | 1 dok | 16,300,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|--------------|---------|--------------------|------|---------|--------------------|
| 01 | 1 | 01 | 21 | Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya | Jumlah dokumen | Watansoppeng | 1 dok | 15,500,000 | APBD | 1 dok | 16,300,000 |
| 01 | 1 | 01 | 22 | Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana | Jumlah dokumen | Watansoppeng | 1 dok | 15,500,000 | APBD | 1 dok | 16,300,000 |
| | | | 26 | Inovasi Pelayanan Publik | | Watansoppeng | 1 dok | 53.816.250 | APBD | 1 dok | 181.852.475 |
| | | | | Penyusunan Indikator Ekonomi | Jumlah dokumen Indikator Ekonomi | Watansoppeng | | - | - | 1 dok | 90,000,000 |
| 4 | 01 | 01 | 03 | Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase ASN yang meningkat kompetensinya dalam hal perencanaan | Watansoppeng | 43.90 | 102.300.000 | APBD | 58.54 | 221,000,000 |
| 01 | 01 | 03 | 01 | Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana | Jumlah tenaga perencanaan yang lulus bersertifikat dan yang mengikuti diklat/bimtek | Watansoppeng | 18 org | 61.000.000 | APBD | 24 org | 91,000,000 |
| | | | | Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Peserta Workshop | Watansoppeng | 100 org | 41.300.000 | APBD | 100 org | 130,000,000 |
| | | | | Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan pembangunan Daerah | % program RPJMD yang dijabarkan kedalam RKPD | Watansoppeng | 100% | 201.675.000 | APBD | 100% | 385,000,000 |
| | | | | Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) | Jumlah dokumen hasil evaluasi | Watansoppeng | 1 dok | 15.000.000 | APBD | 1 dok | 35,000,000 |
| | | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah | Jumlah dokumen hasil monev pelaksanaan APBD dan APBN rencana pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Soppeng | Watansoppeng | 2 dok | 43.200.000 | APBD | 2 dok | 80,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|----------------|-------------|----------------------|------|--|----------------------|----------------------|
| | | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen LKJIP Kabupaten | Watansoppeng | 1 dok | 65.075.000 | APBD | | 1 dok | 55,000,000 |
| | | | | Evaluasi Mandiri Kepala Daerah Barbasis Key Performance Indicator (KPI) | Jumlah dokumen evaluasi | Watansoppeng | 2 dok | 78.400.000 | APBD | | 2 dok | 165,000,000 |
| | | | | Pembangunan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi | Jumlah aplikasi/software | Watansoppeng | - | - | - | | 1 paket pemeliharaan | 50,000,000 |
| | | | | Program Pelayanan Perkantoran | % Penyelesaian kegiatan tepat waktu | Watansoppeng | 100% | 1,268.045.509 | APBD | | 100% | 1,462,000,000 |
| 01 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | Bappelitbangda | 12 kali | 112.000.000 | APBD | | 12 kali | 120,000,000 |
| 01 | 01 | 01 | 05 | Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional | Bappelitbangda | 15 unit | 4,750.000 | APBD | | 15 unit | 5,500,000 |
| 01 | 01 | 01 | 05 | Penyediaan layanan kebersihan kantor | Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan | Bappelitbangda | 1 Paket | 204.125.000 | APBD | | 1 paket | 204.125.000 |
| 01 | 01 | 01 | 06 | Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah alat listrik/penerangan bangunan | Bappelitbangda | 20 buah | 10.252.000 | APBD | | 20 buah | 10,000,000 |
| 01 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan Peralatan Rumah tangga | Jumlah Peralatan Rumah tangga | Bappelitbangda | 10 jenis | 11.677.000 | APBD | | 15 jenis | 9,000,000 |
| 01 | 01 | 01 | 08 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undang | Bappelitbangda | 10 terbitan | 11,000,000 | APBD | | 10 terbitan | 11,000,000 |
| 01 | 01 | 01 | 09 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah pengisian gas | Bappelitbangda | 12 kali | 1,400,000 | APBD | | 12 kali | 1,500,000 |
| 01 | 01 | 01 | 10 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah serta kedinasan lainnya | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | Bappelitbangda | 1070 kali | 492.190.909 | APBD | | 1100 kali | 800,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|--|---|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|---|-------------|--------------------|
| | | | | Peningkatan pelayanan pekantoran | Jumlah Paket pelayanan Perkantoran | Bappelitbangda | 4 paket | 420.650.000 | APBD | | 4 paket | 340,000,000 |
| | | | | Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor | Jumlah Informasi yang terupdate dalam setahun | Bappelitbangda | - | - | APBD | | 48 berita | 55,000,000 |
| 4 | 01 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | % pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran | Bappelitbangda | 90 % | 651.010.000 | APBD | | 90 % | 357,750,000 |
| | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan dinas | Bappelitbangda | | | | | | |
| | | | | | Roda 2 | | - | - | APBD | | 2 unit | 40,000,000 |
| | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang diadakan | Bappelitbangda | | 67.950.000,- | | | | |
| | | | | | Filling kabinet | Bappelitbangda | 2 unit | 10.000.000 | | | 2 unit | 15,000,000 |
| | | | | | Notebook | Bappelitbangda | 2 unit | 18.800.000 | | | 1 unit | 20.000.000 |
| | | | | | Printer | Bappelitbangda | 2 unit | 6.000.000 | | | 2 unit | 7.000.000 |
| | | | | | Scenner | Bappelitbangda | 1 unit | 12.000.000 | APBD | | 1 unit | 10,000,000 |
| | | | | | Lemari | Bappelitbangda | - | - | - | - | 2 unit | 15.000.000 |
| | | | | | - Hardisk | Bappelitbangda | | - | APBD | | 5 unit | 5,750,000 |
| 01 | 01 | 02 | 10 | Pengadaan Mebeuler | -meja kerja | Bappelitbangda | 3 bh | 6.600.000 | APBD | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|----------------|---------|--------------------|------|--|---------|------------|
| | | | | | - Kursi Kerja | Bappelitbangda | 3 bh | 4.350.000 | APBD | | 5 buah | 10,000,000 |
| | | | | | - Kursi rapat pimpinan | Bappelitbangda | 2 bh | 6.200.000 | APBD | | | |
| | | | | | - kursi tunggu | Bappelitbangda | 1 buah | 4,000,000 | APBD | | | |
| 01 | 01 | 02 | 13 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Gedung kantor | Bappelitbangda | 1 unit | 100.000.000 | APBD | | 1 unit | 90,000,000 |
| | | | | <i>Rehabilitas sedang/berat gedung kantor</i> | | | | 233.650.000 | APBD | | | |
| | | | | | - <i>Rehabilitasi</i> | Bappelitbangda | 1 paket | 195.000.000 | APBD | | - | - |
| | | | | | - <i>Perencanaan</i> | Bappelitbangda | 1 paket | 5.850.000 | APBD | | - | - |
| | | | | | - Pengawasan | Bappelitbangda | 1 paket | 7.800.000 | APBD | | - | - |
| | | | | | - Taman kantor sekretariat forum Kabupaten sehat | Bappeitbangda | 1 paket | 25.000.000 | APBD | | - | - |
| | | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Bappelitbangda | | 218.460.000 | | | | |
| | | | | | Roda 2 | Bappelitbangda | 11 unit | 48.460.000 | APBD | | 15 unit | 50,000,000 |
| | | | | | Roda 4 | Bappelitbangda | 2 unit | 170.000.000 | APBD | | 1 unit | 60,000,000 |
| 01 | 01 | 02 | 15 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | Bappelitbangda | | 30.950.000 | | | | |
| | | | | | - AC | Bappelitbangda | 20 unit | 9.000.000 | APBD | | 20 unit | 25,000,000 |
| | | | | | - Mebeleur | Bappelitbangda | 1 paket | 4.000.000 | | | 3 paket | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|----|---|--|----------------|---------|----------------------|------|--|---------|-------------------|
| | | | | | - LCD | Bappelitbangda | 2 unit | 1.000.000 | | | 2 unit | |
| 01 | 01 | 02 | 19 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | Bappelitbangda | | | | | | |
| | | | | | - Kpmputer/PC | Bappelitbangda | 12 unit | 4.200.000 | | | 14 unit | 25,000,000 |
| | | | | | -Notebook | | 15 unit | 8.250.000 | | | 20 unit | |
| | | | | | - Printer | | 15 unit | 4.500.000 | | | 19 unit | |
| 4 | 01 | 04 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | % Penyusunan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu | Watansoppeng | 100% | 27.800.000 | APBD | | 100% | 42,000,000 |
| 01 | 01 | 04 | 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan keuangan Semesteran/Akhir Tahun | Watansoppeng | 7 dok | 9.000.000 | APBD | | 7 dok | 23,000,000 |
| | | | | | Laporan Kinerja Bappelitbangda | Lalabatarilau | 1 dok | | | | 1 dok | |
| | | | | | LPPD dan LKPJ Bappelitbangda | Lalabatarilau | 2 dok | | | | 2 dok | |
| | | | | | RKA Pokok & Perubahan | Lalabatarilau | 2 dok | | | | 2 dok | |
| | | | | | Renja Pokok & Perubahan | Lalabatarilau | 2 dok | | | | 2 dok | |
| | | | | | Renstra Bappelitbangda & Renstra perubahan | Lalabatarilau | 1 dok | | | | | |
| 01 | 01 | 04 | 04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun | Jumlah Laporan Keuangan Semesteran/akhir tahun | Lalabatarilau | 2 dok | 18.800.000 | APBD | | 2 dok | 19,000,000 |
| JUMLAH | | | | | | | | 4.092.952.759 | | | | |

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Soppeng Tahun 2018, merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2018. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja tahun 2018 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2018.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Bappelitbangda Kabupaten Soppeng berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2018 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2018 Sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2018, dimana Renja Tahun 2018 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Bappelitbangda, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2018 sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan. Bappelitbangda wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2018.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2018 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.
5. Renja Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,

sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

